

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu (Harahap, 2015:105). Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang berguna bagi investor dan kreditor dalam pengambilan keputusan investasi dan kredit (Hery, 2017:4). Investor sangat berkepentingan terhadap laporan keuangan yang disusun *investee* terutama dalam hal pembagian dividen, sedangkan kreditor berkepentingan dalam hal pengambilan jumlah pokok pinjaman berikut bunganya.

Laporan keuangan seharusnya memberikan informasi mengenai asset, kewajiban, dan modal perusahaan untuk membantu investor dan kreditor serta pihak-pihak lainnya dalam mengevaluasi kekuatan dan kelemahan keuangan perusahaan. Fokus utama dari pelaporan keuangan tersebut adalah informasi mengenai kinerja perusahaan yang diberikan oleh ukuran laba dan komponen-komponennya (Hery, 2017:4). Diharapkan dalam pelaporan keuangan tersebut memberikan informasi atas kondisi yang sebenarnya.

Namun, pada kenyataannya dalam penyusunan laporan keuangan terdapat suatu kelemahan ketika laporan keuangan tersebut berbasis akrual yang melibatkan banyak estimasi dan taksiran. Komponen akrual merupakan komponen yang tidak memerlukan bukti kas secara fisik

sehingga upaya mempermainkan besar kecilnya komponen akrual tidak harus disertai dengan kas yang diterima atau dikeluarkan perusahaan (Sulistyanto, 2014:161). Terdapat kelemahan mendasar yang melekat dalam akuntansi berbasis akrual, yaitu sifat *account* akrual yang rawan untuk direayasa. Hanya dengan mempermainkan komponen-komponen akrual, khususnya komponen pendapatan dan biaya, perusahaan dapat mengatur besar kecilnya laba dalam suatu periode tertentu dibandingkan laba sesungguhnya (Sulistyanto, 2014:162). Adanya akuntansi berbasis akrual tersebut dapat mendorong perusahaan untuk melakukan perubahan terhadap laporan keuangan menjadi tidak riil untuk kepentingan pribadi maupun manajemen. Perubahan tersebut mengacu terhadap laba, karena laba dapat mengukur prestasi perusahaan dan juga dapat menjadi informasi pembagian laba serta dapat menentukan kebijakan investasi bagi *stakeholders* diantaranya pemegang saham, investor, pemasok, kreditur, karyawan, dan lain-lain. Melihat pentingnya angka laba bagi perusahaan, perusahaan berupaya untuk menciptakan laba dengan nilai yang sebaik-baiknya bukan yang sebenar-benarnya. Ketika laba tersebut dibentuk bukan berdasarkan kondisi yang sebenarnya, kegiatan tersebut termasuk kedalam manajemen laba.

Manajemen laba adalah kebijakan akuntansi, atau tindakan nyata yang dipilih manajer untuk mempengaruhi laba sehingga pada pelaporannya perusahaan mencapai tujuan laba yang spesifik (Scott, 2015:445). Alasan

perusahaan melakukan manajemen laba dijelaskan (Sulistyanto, 2014:47)

bahwa:

“Harga pasar saham suatu perusahaan secara signifikan dipengaruhi oleh laba, risiko, dan spekulasi. Oleh sebab itu, perusahaan yang labanya selalu mengalami kenaikan dari periode ke periode secara konsisten akan mengakibatkan risiko perusahaan ini mengalami penurunan lebih besar dibandingkan prosentase kenaikan laba. Hal inilah yang mengakibatkan banyak perusahaan yang melakukan pengelolaan dan pengaturan laba sebagai salah satu upaya untuk mengurangi risiko.”

Manajemen laba ini sudah menjadi fenomena akuntansi di dunia. Banyak perusahaan-perusahaan besar di dunia melakukan rekayasa akuntansi melalui manajemen laba. Perusahaan tersebut diantaranya kasus yang terjadi pada Satyam Computer Services di India pada tahun 2009 yang telah memalsukan neraca keuangan dan asetnya. Kasus ini di sebut Enron's India, seperti yang diungkapkan oleh Jigar Shah (Senior Vice-President Kim Eng Securities) yang menyatakan bahwa “kasus ini bagi India menyerupai kasus Enron di AS. Masalah ini tidak akan berhenti di Satyam, akan ada lebih banyak perusahaan yang akan mengalami seperti ini, ada kemungkinan besar investasi di India akan terpengaruh.” Manajemen laba juga telah mengguncang Jepang dengan terjadinya kasus pada perusahaan Olympus (2011) dan Toshiba (2015). Pada Olympus terdapat sejumlah dana yang mencurigakan terkait akuisisi produsen peralatan medis asal Inggris, Gyrus, pada tahun 2008 lalu senilai US\$ 2,2 miliar, juga melibatkan biaya penasihat US\$ 687 juta, dan pembayaran kepada tiga perusahaan investasi lokal US\$ 773 juta. Dana-dana tersebut ternyata digunakan untuk menutupi kerugian investasi di masa lalu tersebut. Beberapa bulan kemudian,

pembayaran kepada tiga perusahaan investasi lokal itu dihapus dari buku. Menurut Ryosuke Okazaki (Kepala Investasi ITC Investment Partners) bahwa “Olympus sudah mengaku mengisi data palsu di laporan keuangan untuk menutupi kerugian selama 20 tahun.” Pada kasus Toshiba, Komite Tim Independen mengemukakan “keuntungan perusahaan dibesar-besarkan menjadi 151,8 miliar yen atau setara 1,2 miliar dollar AS selama periode lima tahun.” Fenomena terkait manajemen laba ini tidak hanya terjadi di India ataupun Jepang, tetapi banyak terjadi di Negara-Negara lain di dunia seperti Enron di AS (2001), Parmalat di Italia (2003), British Telecom di Inggris (2017), dan juga termasuk Indonesia.

Di Indonesia, manajemen laba pernah terjadi pada beberapa perusahaan seperti PT. Kereta Api (2006), Bank Century (2009), PT. Waskita Karya (Persero) Tbk. (2009), PT. Inovisi Infracom Tbk. (2015), PT. Timah (Persero) Tbk. (2016), dan perusahaan lainnya. Pada kasus PT. Kereta Api, diungkapkan oleh Hekinus Manao (Komisaris PT Kereta Api) bahwa laporan keuangan tersebut di mana seharusnya perusahaan merugi namun dilaporkan memperoleh keuntungan, “Saya tahu bahwa ada sejumlah pos yang sebetulnya harus dinyatakan sebagai beban bagi perusahaan tetapi malah dinyatakan masih sebagai asset perusahaan. Jadi ada trik akuntansi.” Pada kasus Bank Century, menurut Pradjoto (Pengamat Hukum Perbankan) bahwa Bank Century banyak mencantumkan kredit fiktif dan L/C fiktif dalam laporan keuangannya serta asset-asset lainnya yang ternyata bohong. PT. Waskita Karya juga terlibat dalam kasus manajemen laba yaitu dengan

kelebihan pencatatan laba bersih sebesar Rp. 500 miliar diketahui saat dilakukan audit laporan keuangan menyeluruh seiring pergantian direksi pada tahun 2008. Direksi melakukan rekayasa keuangan sejak tahun buku 2004-2008 dengan memasukkan proyeksi pendapatan proyek multi tahun ke depan sebagai pendapatan tahun tertentu. Said Didu (Sekretaris Kementerian BUMN) mengemukakan, “adanya rekayasa keuangan terendus ketika perusahaan mengkaji rencana penawaran saham perdana kepada publik (IPO).” Manajemen laba juga terjadi pada PT. Inovisi Infracom Tbk dengan kode saham INVS yang dimana perdagangan sahamnya di *suspense*, laporan keuangan yang banyak salah menjadi penyebabnya. Bursa Efek Indonesia menemukan sekitar delapan kesalahan dalam laporan keuangan perusahaan investasi itu pada kuartal III-2014. Menurut Reza Priyambada (Kepala Riset NH Korindo) mengemukakan “kalau melihat kejadian yang ada, seperti laporan keuangan yang terkesan dimanipulasi, ada kemungkinan ke arah situ (membohongi investor).” Sedangkan, kasus pada PT. Timah, menurut Ali Samsuri (Ketua IKT) telah terjadi manipulasi laporan keuangan semester I-2015 yang dinyatakan membuahkan kinerja yang positif, padahal kenyataannya pada semester tersebut laba operasi rugi sebesar Rp. 59 miliar. Kasus mengenai manajemen laba juga pernah di ungkapkan oleh Hasan Bisri (Wakil ketua BPK) bahwa “kami masih banyak menemukan BUMN melakukan rekayasa akuntansi, agar labanya terlihat lebih besar,...”.

Adanya kasus manajemen laba di Indonesia seperti pada beberapa kasus di atas, kemungkinan dipengaruhi oleh lemahnya tata kelola perusahaan.

Berdasarkan PER-09/MBU/2012 pasal 1 ayat 1 bahwa tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), yang selanjutnya disebut GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha. Menurut Sigit Purnomo (Ketua Dewan Pengurus *Institute for Corporate Directorship/IICD*) bahwa di Indonesia, GCG dinilai kurang menarik dibandingkan isu lainnya, dibandingkan dengan Negara Asean lainnya, penerapan GCG oleh perusahaan-perusahaan Indonesia masih jauh di bawah Negara Asean lainnya seperti Thailand, Singapura, dan Malaysia. Indonesia masih tergolong kurang dalam hal penerapan GCG. Berikut adalah skor GCG di Asia:

Tabel 1.1 Skor *Good Corporate Governance* di Asia

No.	Negara	Skor		
		2010	2012	2014
1.	Hongkong	65	66	65
2.	Singapura	67	69	64
3.	Jepang	57	55	60
4.	Thailand	55	58	58
5.	Malaysia	52	55	58
6.	Taiwan	55	53	56
7.	India	48	51	54
8.	Korea	45	49	49
9.	Cina	49	45	45
10.	Filipina	37	41	40
11.	Indonesia	40	37	39

Sumber: CG watch market scores report by Asian Corporate Governance Association (ACGA), Oktober 2014 (Lukviarman, 2016:26).

Tabel di atas menunjukkan bahwa semakin rendah skor, semakin buruk penerapan GCG. Berdasarkan tabel tersebut, Indonesia masih lemah dalam

hal penerapan *good corporate governance* dengan skor 39 pada tahun 2014. Indonesia mengalami penurunan di mana pada tahun 2010 mendapat skor 40 dan masih unggul dari Filipina, namun pada tahun 2014 justru menjadi 39 dan berada di bawah Filipina. Sumber lain mengatakan bahwa Indonesia berada pada tingkat ke 2 dari bawah dalam aplikasi GCG di Asia Tenggara pada tahun 2013. Skor tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.2 Tabel Skor *Good Corporate Governance* ASEAN tahun 2013

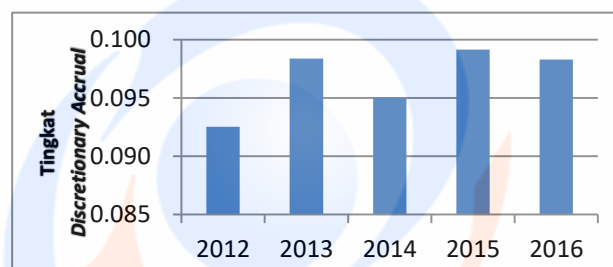
No.	Negara	Skor
1	Thailand	75,39
...		
9.	Indonesia	54,55
10.	Vietnam	38,7

Sumber: data dari *Indonesian Institute for Corporate Directorship/ IICD*, (Nurhaida, 2014).

Tabel di atas menunjukkan bahwa semakin rendah skor, semakin buruk penerapan GCG. Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa Indonesia berada ditingkat 2 terbawah. Data tersebut menggambarkan bahwa GCG di Indonesia pada tahun tersebut masih lemah. Kendala paling mendasar dalam penerapan CG di Indonesia berhubungan dengan moral dan etika. Hal tersebut menunjukkan bahwa kendalanya ada pada sisi manusianya atau individu yang berada dalam sistem tersebut. Argumen ini didasarkan pada kenyataan bahwa seberapa canggih perangkat sistem yang dimiliki tidak akan mampu memberikan hasil optimal, jika tidak diiringi oleh kemauan para individu/pebisnis untuk patuh atau taat terhadap aturan main yang telah digariskan (Lukviarman, 2016:81).

Kasus-kasus manajemen laba yang terjadi di Indonesia, salah satunya dilakukan oleh perusahaan sektor konstruksi dan bangunan yaitu PT. Waskita Karya (Persero) Tbk. Menurut Sumaryanto Widayatin (Kepala Badan Pembina Konstruksi dan SDM Dep. PU) “apabila perusahaan konstruksi seperti PT. Waskita Karya beroperasi serta membangun proyek skala besar tentunya berpotensi menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan (mengelola laba).”

Manajemen laba dapat diketahui melalui besaran *discretionary accrual* (DA) dan *non discretionary accrual* (NDA) yang dilakukan oleh manajer. Menurut (Sulistiyanto, 2014:164), *Discretionary accrual* (DA) adalah komponen akrual hasil rekayasa manajerial dengan memanfaatkan kebebasan dan keleluasan dalam estimasi dan pemakaian standard akuntansi. Sedangkan, *non discretionary accrual* (NDA) adalah komponen akrual yang diperoleh secara alamiah dari dasar pencatatan akrual dengan mengikuti standard akuntansi yang diterima secara umum. Berikut adalah grafik rata-rata *discretionary accrual* (DA) pada perusahaan konstruksi dan bangunan periode tahun 2012-2016 yang di mana data diambil dari laporan tahunan.

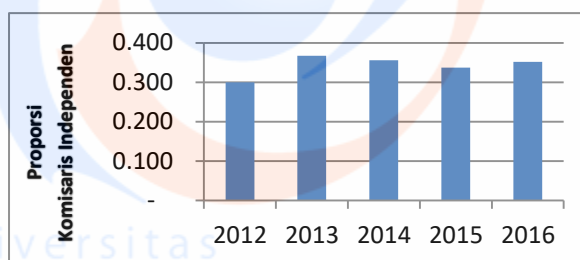


Sumber: Data diolah, 2017

Gambar 1.1 Rata-rata *Discretionary Accrual* (DA)

Tabel di atas menunjukkan besaran rata-rata DA pada 7 perusahaan konstruksi dan bangunan. Berdasarkan tabel di atas, Masih terjadi kebijakan dengan DA yang masih menjauhi angka 0, dimana jika DA sama dengan 0 menunjukkan tidak terjadi manajemen laba. Jika DA positif/negatif menunjukkan adanya manajemen laba, bisa dengan menaikkan laba atau menurunkan laba. DA pada grafik di atas masih menunjukkan adanya praktik manajemen laba dengan tingkat rata-rata yang beragam. Pada tahun 2012, DA sebesar 0,093. Pada tahun 2013, DA sebesar 0,098. Pada tahun 2014, DA sebesar 0,095. Pada tahun 2015 dan 2016, DA sebesar 0,099 dan 0,098.

Manajemen laba dapat dipengaruhi oleh adanya komisaris yang independen pada perusahaan. Komisaris independen merupakan pihak yang mempunyai tanggung jawab untuk mendorong diterapkannya prinsip GCG untuk menjamin transparansi dan keterbukaan laporan keuangan, keadilan untuk semua stakeholder, dan pengungkapan semua informasi meski ada konflik kepentingan (Sulistyanto, 2014:155). Berdasarkan definisi di atas menunjukkan bahwa komisaris independen sangat berpengaruh dalam menurunkan praktik manajemen laba, atau ada hubungan negatif antara proporsi independensi dewan komisaris dengan level manajemen laba (Sulistyanto, 2014:158). Berikut adalah grafik komisaris independen pada perusahaan konstruksi dan bangunan tahun 2012-2016 yang di mana data diambil dari laporan tahunan.



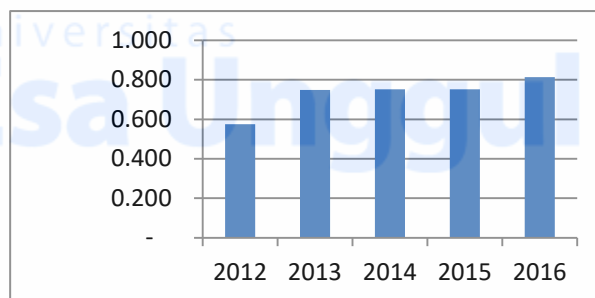
Sumber: Data diolah, 2017

Gambar 1.2 Rata-rata proporsi Komisaris Independen

Tabel tersebut menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen telah sesuai dengan PER OJK No. 33/POJK.04/2014 pasal 20 ayat 3, di mana komposisi komisaris independen paling sedikit 0.3 atau 30%. Hanya beberapa perusahaan yang masih di bawah 30% diantaranya DGIK, SSIA, dll. Namun, yang menjadi permasalahan adalah adanya proporsi komisaris independen tetapi belum cukup untuk mengurangi adanya praktik manajemen laba.

Selain komisaris independen, asimetri informasi juga dapat berpengaruh terhadap manajemen laba. Asimetri informasi adalah ketika beberapa pihak dalam transaksi bisnis memiliki informasi keuntungan atas orang lain atau dapat mengambil tindakan yang *unobservable* kepada orang lain, (Scott, 2015:22). Adanya asimetri tersebut, manajer mempunyai kesempatan untuk mengelabui pengguna informasi dengan cara melakukan praktik manajemen laba agar laba yang dihasilkan dapat mempengaruhi keputusan mereka. Semakin besar asimetri informasi tersebut semakin besar dorongan bagi manajer untuk berperilaku oportunis atau manajemen laba (Sulistiyanto, 2014:21).

Pada perusahaan konstruksi dan bangunan, asimetri informasi cenderung meningkat seperti yang digambarkan pada grafik asimetri informasi dengan pengukuran *bid-ask spread* di bawah ini.



Sumber: Data diolah, 2017

Gambar 1.3 Rata-rata asimetri informasi (*bid-ask spread*)

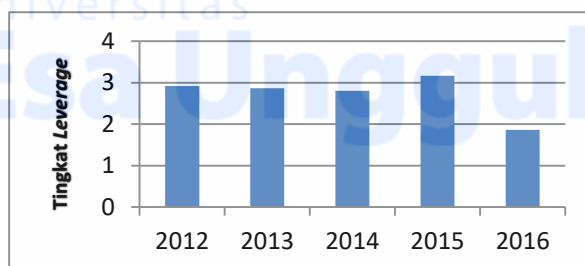
Grafik tersebut menunjukkan besaran asimetri informasi yang dilakukan oleh 7 perusahaan konstruksi dan bangunan. Pada tahun 2012, rata-rata asimetri informasi sebesar 0,574. Pada tahun 2013 sebesar 0,749. Pada tahun 2014, rata-rata asimetri informasi sebesar 0,751. Dan pada tahun 2015 dan 2016 mengalami peningkatan asimetri informasi yaitu sebesar 0,751 dan 0,813. Grafik tersebut menunjukkan bahwa asimetri informasi berfluktuasi dan cenderung meningkat.

Selain ketiga faktor di atas, *leverage* juga dianggap sebagai faktor yang dapat mempengaruhi kegiatan manajemen laba. menurut (Kasmir, 2017: 151), *leverage* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva atau modal perusahaan dibiayai dengan hutang. Pengaruh *leverage* terhadap manajemen laba dijelaskan (Sulistiyanto, 2014:63) sebagai berikut:

“Debt (Equity) hypothesis menyatakan bahwa perusahaan yang mempunyai rasio antara hutang dan ekuitas lebih besar, cenderung memilih dan menggunakan metode-metode akuntansi dengan laporan laba yang lebih

tinggi serta cenderung melanggar perjanjian utang apabila ada manfaat dan keuntungan tertentu yang dapat diperolehnya.”

Rata-rata *Leverage* berdasarkan data dari laporan tahunan perusahaan konstruksi dan bangunan dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:



Sumber: Data diolah, 2017.

Gambar 1.4 Rata-rata *leverage* (DER)

Grafik di atas merupakan grafik DER dari 7 perusahaan konstruksi dan bangunan. Grafik tersebut menunjukkan bahwa *leverage* yang diukur dengan *Debt to Equity Ratio* (DER) menunjukkan rata-rata yang fluktuasi. DER tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 3,17 atau setara dengan 317 %. Rata-rata DER pada perusahaan tersebut kurang baik karena pada periode penelitian dari 2012-2016 menunjukkan bahwa DER cukup tinggi (di atas 100%) , dan mengalami peningkatan pada tahun 2015.

Perusahaan konstruksi dan bangunan merupakan perusahaan dengan rasio hutang yang sangat tinggi (lihat gambar 1.4), sehingga mempunyai kecenderungan yang besar untuk melakukan manajemen laba dalam mengurangi resiko atas hutang tersebut. Hal ini menjadi alasan Penulis untuk meneliti pada perusahaan tersebut, terlebih lagi perusahaan ini dianggap berpotensi untuk mengelola laba.

Banyak penelitian-penelitian mengenai manajemen laba diantaranya, penelitian oleh (Susanto, 2016) dengan judul penelitian *The Effect of Audit Commitees and Corporate Governance on Earnings Management* bahwa komisaris independen memiliki pengaruh terhadap manajemen laba. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian oleh (Tiswiyanti, dkk., 2012) yang menunjukkan hasil bahwa komisaris independen mempunyai pengaruh terhadap manajemen laba. Namun, hasil tersebut bertentangan dengan penelitian (Marlisa, dkk., 2016) yang menemukan bahwa komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap manajemen laba. Penelitian oleh (Muliati, 2011) dengan judul penelitian *Pengaruh Asimetri Informasi dan Ukuran Perusahaan pada Praktik Manajemen Laba*, hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa asimetri informasi berpengaruh positif pada praktik manajemen laba. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ghani, *et.al.*, 2017) Bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara asimetri informasi dengan manajemen laba. Namun, hasil tersebut bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Agustian, 2016) bahwa asimetri informasi tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Penelitian oleh (Astari, dkk., 2017) menemukan hasil bahwa *leverage* berpengaruh positif dan signifikan pada manajemen laba. Hasil tersebut bertentangan dengan penelitian oleh (Jao, *et.al.*, 2011) yang menyatakan bahwa *leverage* tidak mempunyai pengaruh terhadap manajemen laba.

Berdasarkan uraian di atas, seperti masih banyaknya kasus manajemen laba, kecenderungan perusahaan untuk melakukan manajemen laba, dan

hasil penelitian terdahulu yang masih belum konsisten menjadikan Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Pengaruh Komisaris Independen, Asimetri Informasi, dan Leverage Terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Konstruksi dan Bangunan yang Terdaftar di BEI tahun 2012-2016.**

1.2. Identifikasi dan Pembatasan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dibentuk identifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Masih banyak kasus manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia.
- b. Penerapan GCG pada perusahaan-perusahaan Indonesia masih tergolong lemah, dan masih berada di bawah Negara Asean lainnya seperti Malaysia, Thailand, Singapura, dll.
- c. Perusahaan konstruksi dan bangunan dianggap berpotensi melakukan manajemen laba (Sumaryanto Widayatin).
- d. Adanya dewan komisaris independen di dalam perusahaan namun praktik manajemen laba masih saja terjadi.
- e. Asimetri informasi cenderung meningkat.
- f. *Leverage* perusahaan menunjukkan angka yang tinggi.

1.2.2. Pembatasan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang teridentifikasi, maka peneliti membatasi masalah dalam skripsi ini, diantaranya:

- a. Penelitian pada perusahaan konstruksi dan bangunan yang terdaftar di BEI tahun 2012-2016, dan terdaftar secara berturut-turut selama periode penelitian.
- b. Membatasi penelitian terhadap manajemen laba sebagai variabel dependen yang diukur dengan *discretionary accruals*.
- c. Variabel independen dalam penelitian ini adalah komisaris independen, asimetri informasi, dan *leverage*.

1.3. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dibentuk rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Apakah terdapat pengaruh secara simultan komisaris independen, asimetri informasi, dan *leverage* terhadap manajemen laba pada perusahaan konstruksi dan bangunan di BEI tahun 2012-2016?
- b. Apakah terdapat pengaruh komisaris independen terhadap manajemen laba pada perusahaan konstruksi dan bangunan di BEI tahun 2012-2016?
- c. Apakah terdapat pengaruh asimetri informasi terhadap manajemen laba pada perusahaan konstruksi dan bangunan di BEI tahun 2012-2016?
- d. Apakah terdapat pengaruh *leverage* terhadap manajemen laba pada perusahaan konstruksi dan bangunan di BEI tahun 2012-2016?

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, adalah:

- a. Untuk mengetahui pengaruh komisaris independen, asimetri informasi, dan *leverage* secara simultan terhadap manajemen laba pada perusahaan konstruksi dan bangunan di BEI tahun 2012-2016.
- b. Untuk mengetahui pengaruh komisaris independen terhadap manajemen laba pada perusahaan konstruksi dan bangunan di BEI tahun 2012-2016.
- c. Untuk mengetahui pengaruh asimetri informasi terhadap manajemen laba pada perusahaan konstruksi dan bangunan di BEI tahun 2012-2016.
- d. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap manajemen laba pada perusahaan konstruksi dan bangunan di BEI tahun 2012-2016.

1.5. Manfaat Penelitian

a. Bagi pengguna laporan keuangan

Penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam menilai laba perusahaan, sehingga dapat menjadi tolak ukur dalam pengambilan keputusan mengenai keputusan investasi, kredit, dan yang lainnya.

b. Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai praktik manajemen laba, dan senantiasa untuk menghindarinya karena dapat merugikan perusahaan yaitu dapat menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap perusahaan.

c. **Pemerintah**

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam hal pengambilan keputusan untuk lebih ditingkatkan atau tidaknya peraturan sehingga manajemen laba tidak terjadi lagi.

d. **Bagi peneliti selanjutnya**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut.